



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Badan Pendapatan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
KODE PROGRAM	Referensi Lama / Kepmendagri Belum Dipetakan 5.02.01		
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. SKM Bapenda dilaksanakan mengacu PermenPANRB No. 14 Tahun 2017. Instrumen SKM memuat identitas responden termasuk jenis kelamin, sehingga nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dipilah laki-laki dan perempuan. Laporan & tindak lanjut SKM disusun triwulanan (TW I–IV). Pada SKM 2025, IKM Perangkat Daerah mencapai 90,25 (kategori Sangat Baik), melampaui target 86. SKM 2025 diikuti 4.114 responden: laki-laki 2.261 orang (55,0%) dan perempuan 1.853 orang (45,0%). Data responden sudah terpilah jenis kelamin (Rekap Gender SKM 2025), namun nilai IKM belum dihitung dan dilaporkan secara terpilah, sehingga perbedaan tingkat kepuasan serta kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki atas layanan belum diketahui dan belum ditindaklanjuti 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : 1) Akses: Layanan PPRD/Samsat secara historis lebih banyak diakses laki-laki; pada SKM 2025 responden perempuan 45,0%, sedikit di bawah laki-laki (55,0%). Partisipasi: Meski responden perempuan cukup terwakili (45,0%), suara perempuan belum tergambar dalam hasil karena IKM tidak dianalisis terpilah; partisipasi dalam forum tindak lanjut masih rendah. Kontrol: Penentuan prioritas tindak lanjut hasil SKM belum mempertimbangkan hasil terpilah dan kebutuhan perempuan; pengambilan keputusan didominasi laki-laki. Manfaat: Perbaikan layanan hasil tindak lanjut SKM belum tentu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan (mis. ruang laktasi, ruang tunggu ramah anak/lansia, loket/antrian prioritas, keamanan dan kenyamanan, kejelasan informasi). b. Penyebab Internal : 1) Data jenis kelamin responden sudah tersedia dan terekap, tetapi nilai IKM belum diolah dan dilaporkan secara terpilah. Belum ada SOP/ketentuan yang mewajibkan analisis dan tindak lanjut hasil SKM secara terpilah gender. Kapasitas tim penyusun laporan SKM dalam analisis responsif gender masih terbatas. Sarana dan prasarana layanan kantor belum sepenuhnya responsif gender. c. Penyebab Eksternal : 1) Beban domestik dan keterbatasan waktu menyebabkan perempuan lebih jarang datang ke kantor layanan maupun mengisi survei. Norma sosial yang mendelegasikan urusan administrasi/pembayaran pajak kepada laki-laki, sehingga perempuan kurang menyuarkan kebutuhannya. Rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, bahwa SKM merupakan kanal untuk menyuarkan kebutuhan atas layanan.		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Tujuan : Mewujudkan layanan Bapenda yang setara gender, di mana kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan terakomodasi dalam perbaikan layanan sehingga manfaatnya dirasakan setara oleh laki-laki dan perempuan. a. Menyediakan jasa pelayanan umum kantor serta pengelolaan SKM yang responsif gender, dengan memastikan hasil SKM dianalisis dan ditindaklanjuti secara terpilah (laki-laki/perempuan) setiap triwulan, sehingga perbaikan layanan menjawab kebutuhan seluruh pengguna termasuk perempuan dan kelompok rentan, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mempertahankan/meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah. 2. Indikator dan Target Kinerja a. Tersusunnya 4 Laporan (TW I–IV) penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang memuat Laporan & Tindak Lanjut SKM dengan IKM terpilah, serta menindaklanjuti kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki atas layanan.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 1.896.257.692		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengolah variabel jenis kelamin yang sudah terekap menjadi nilai IKM serta hasil per unsur layanan secara terpilah L/P pada setiap laporan triwulan. Menyusun 4 Laporan SKM (TW I–IV) yang memuat analisis kesenjangan kepuasan dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil SKM yang menyasar kebutuhan perempuan/kelompok rentan (mis. ruang laktasi; loket/antrian prioritas bagi ibu hamil/membawa anak, lansia, dan disabilitas; keamanan dan kenyamanan ruang tunggu; kejelasan informasi dan alur layanan). Mendorong partisipasi perempuan mengisi SKM dan forum tindak lanjut melalui kanal daring, petugas pendamping, dan sosialisasi. Meningkatkan kapasitas petugas/tim penyusun SKM dalam analisis responsif gender. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut setiap triwulan	
		Masukan	Rp. 1.896.257.692 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua)
		Keluaran	Tersusunnya Laporan dan Tindak Lanjut SKM dengan IKM terpilah laki-laki/perempuan
		Hasil	4 Laporan

Samarinda, 03 November 2025
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah



Bambang Erryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780202 200112 1 003